

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Bencana merupakan ancaman nyata yang dihadapi oleh Indonesia, mengingat kondisi geografis, demografis, sosiologis dan historis menjadikan wilayah Indonesia rentan terhadap risiko bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam ataupun sosial. Berdasarkan geoportal data bencana Indonesia *update* per tanggal 9 Agustus 2022 telah ada 2.199 kejadian bencana dengan kejadian jenis bencana alam yaitu 14 gempa bumi, 149 kebakaran hutan dan lahan, 2 kekeringan, 864 banjir, 404 tanah longsor, 746 cuaca ekstrem dan 20 gelombang pasang/abrasi. Akibat dari kejadian bencana memakan korban 128 jiwa meninggal, 704 orang luka-luka, 23 orang hilang dan 2.615.455 jiwa orang menderita dan harus mengungsi<sup>1</sup>.

Salah satu daerah yang memiliki potensi bencana yang patut diwaspadai adalah Provinsi Sumatera Barat. Dibalik keindahan, kekayaan alam dan nilai historis yang dimiliki oleh daerah ini, Provinsi Sumatera Barat yang terletak di sepanjang pesisir pantai Sumatera dengan luas wilayah 4.229.730 Ha ini memiliki potensi bencana dengan ancaman bencana gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan<sup>2</sup>. Gempa besar pernah melanda Sumatera Barat pada 30 September 2009 dengan kekuatan 7,6 SR dan kemudian disusul keesokan harinya dengan kekuatan

---

<sup>1</sup> *gis.bnpb.go.id*, di akses pada 9 Agustus 2022, pukul 22.27 WIB.

<sup>2</sup> Dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Tahun 2021.

6.8 SR merupakan tragedi memilukan bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat, tidak hanya kehilangan seluruh harta benda melainkan kehilangan nyawa orang-orang tersayang adalah dampak yang sangat memilukan dari kejadian bencana gempa bumi tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021 Provinsi Sumatera Barat memiliki kelas risiko tinggi dengan nilai 147,36 yang merupakan kelas tinggi ancaman bencana salah satunya adalah Kabupaten Padang Pariaman. Berikut data terkait potensi bahaya di Kabupaten Padang Pariaman

**Tabel 1.1 Potensi Bahaya di Kabupaten Padang Pariaman**

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Banjir Bandang	11.481,48	Tinggi
2	Banjir	33.733,40	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	66.513,43	Sedang
4	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	828,81	Tinggi
5	Gempabumi	133.224,00	Tinggi
6	Kebakaran Hutan Dan Lahan	73.427,45	Sedang
7	Kekeringan	133.224,00	Sedang
8	Letusan Gunungapi Tandikek	4.321,05	Sedang
9	Tanah Longsor	43.851,97	Tinggi
10	Tsunami	6.199,08	Tinggi

*Sumber: Hasil Analisa BPBD Padang Pariaman, Tahun 2019*

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa Kabupaten Padang Pariaman memiliki 10 ancaman bencana, yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, longsor, angin puting beliung, abrasi, kekeringan, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan. Namun pada tahun 2020 ditemui ancaman baru yaitu adanya potensi bahaya likuifaksi. Dari ancaman bencana tersebut berikut kejadian bencana yang telah terjadi dalam kurun waktu 2010-2019:

**Tabel 1.2 Sejarah Kebencanaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun  
2010-2019**

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban			Rumah		
		Meninggal	Luka - Luka	Mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan
Angin Puting Beliung	316	10	3	3	88	348	172
Banjir	37	7	3	150	36	79	2.071
Banjir Bandang	7	1	0	0	3	114	37
Gelombang Ekstrem dan Abrasi	1			5			1
Tanah Longsor	36	9	7	0	41	8	16

*Sumber: Catatan Sejarah Kejadian Bencana BPBD Padang Pariaman, 2019*

Berdasarkan pada gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2010-2019 bencana yang sering terjadi adalah angin puting beliung, banjir, banjir bandang, gelombang ekstrem dan tanah longsor yang memberikan dampak besar kepada keselamatan masyarakat. Bencana di Kabupaten Padang Pariaman terjadi juga dikarenakan wilayahnya yang merupakan dataran rendah dan terbuka serta wilayah perbukitan yang mengikuti bukit barisan.

Dengan berbagai kejadian dan dampak dari bencana yang terjadi maka masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana dari pemerintah Indonesia, sebagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bentuk

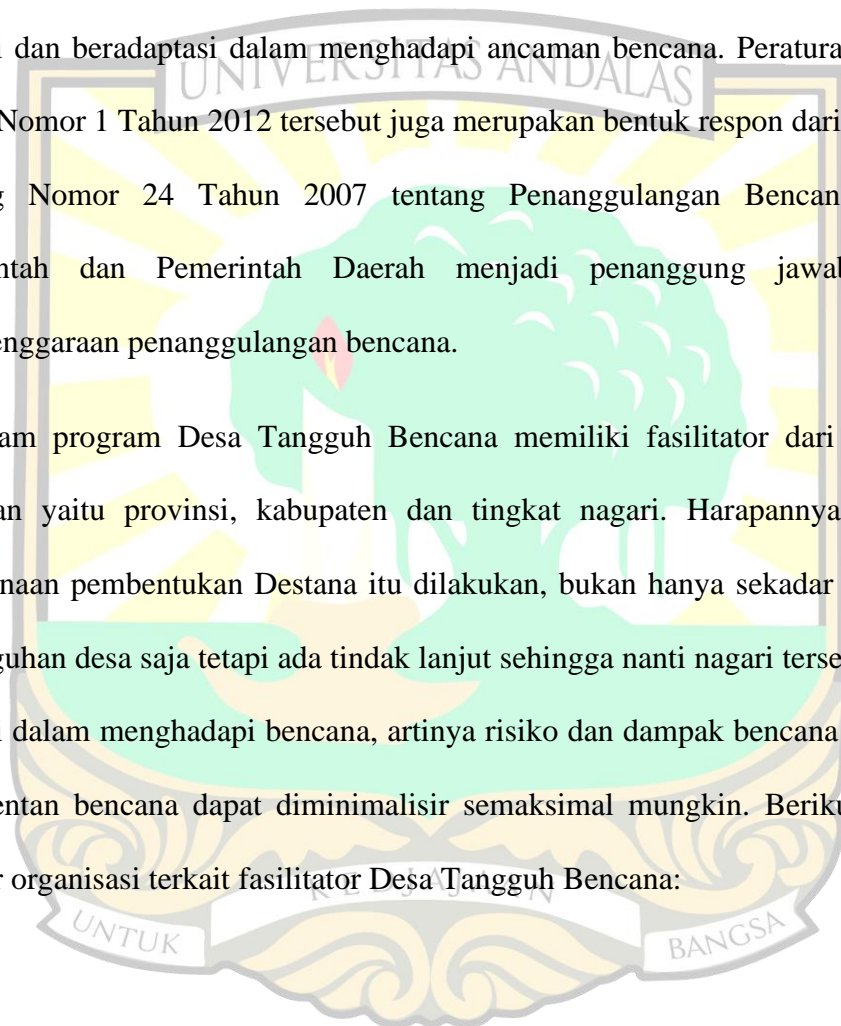
perlindungan dari pemerintah atas kejadian bencana dapat dilakukan melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Hal ini merupakan bentuk pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat. Menurut Moenir (2010:26) pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Urusan bencana merupakan pelayanan dasar yang konkuren bagi pemerintah, hal ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah tingkat Kabupaten/Kota dengan memberikan pelayanan sub urusan bencana yang di atur lebih lanjut pada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan dasar ini terdiri dari:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Dalam aspek pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, BPBD Kabupaten Padang Pariaman dalam membangun ketahanan masyarakat dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melaksanakan sebuah program Desa Tangguh Bencana. Program Desa Tangguh Bencana ini

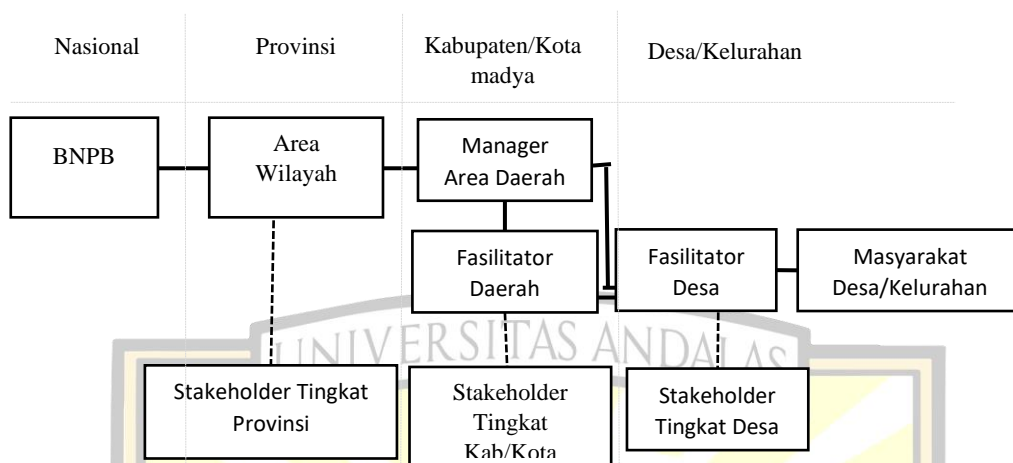
merupakan sebuah program dari BNPB Pusat yang telah di atur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Program Desa Tangguh Bencana merupakan sebuah program yang dilakukan sebagai upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang bertujuan agar masyarakat dapat secara mandiri dan beradaptasi dalam menghadapi ancaman bencana. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tersebut juga merupakan bentuk respon dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam program Desa Tangguh Bencana memiliki fasilitator dari berbagai tingkatan yaitu provinsi, kabupaten dan tingkat nagari. Harapannya sesudah pelaksanaan pembentukan Destana itu dilakukan, bukan hanya sekedar penilaian ketangguhan desa saja tetapi ada tindak lanjut sehingga nanti nagari tersebut dapat mandiri dalam menghadapi bencana, artinya risiko dan dampak bencana di nagari yang rentan bencana dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Berikut bentuk struktur organisasi terkait fasilitator Desa Tangguh Bencana:





**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Fasilitator Desa Tangguh Bencana**



*Sumber: Buku Pedoman Fasilitator Desa Tangguh Bencana, 2020*

Dari gambar 1.1 di atas dapat dilihat aktor yang terlibat dalam penilaian ketangguhan desa/nagari pada program Desa Tangguh Bencana. Dalam pelaksanaan penilaian ketangguhan desa dibutuhkan fasilitator-fasilitator yang akan mendampingi masyarakat dan pemerintahan desa/nagari dalam melakukan penilaian ketangguhan desa/nagari secara mandiri. Dalam program penilaian ketangguhan desa/nagari yang dilakukan pada tahun 2020 oleh BNPB terdapat fasilitator desa/nagari, fasilitator nagari, manajer area daerah, manajer area wilayah. Fasilitator memiliki peran sebagai memperlancar atau bertugas mempermudah proses mempelajari-memahami persoalan dan kemudian memutuskan tindakan.

Program Desa Tangguh Bencana ini pada BPBD Kabupaten Padang Pariaman merupakan sasaran yang sejalan dengan visi dan misi Bupati Padang Pariaman 2021-2024 dan menjadi Indikator Kinerja Utama yaitu “Peningkatan Layanan Kebencanaan, dengan indikator kinerja adalah Jumlah Nagari Tangguh Bencana yang terbentuk. Program Desa Tangguh Bencana atau yang disebut juga dengan Nagari Tangguh Bencana ini telah dilaksanakan sejak tahun 2015 di Kabupaten

Padang Pariaman, hingga saat ini sudah ada 16 Nagari Tangguh Bencana yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. 3 Nagari Tangguh Bencana Kabupaten Padang Pariaman**

Kecamatan	Nagari Tangguh Bencana	Tahun Terbentuk
Batang Anai	Nagari Katapiang	2015
Ulakan Tapakih	Nagari Ulakan	2020
	Nagari Tapakih	2020
	Nagari Manggopoh	2020
	Palak Gadang Ulakan	2020
	Seulayat Ulakan	2021
Nan Sabaris	Nagari Sunua Barat	2020
	Nagari Kurai Taji	2020
2X11 Kayu Tanam	Nagari Anduriang	2019
V Koto Kp Dalam	Nagari Campago	2019
	Nagari Campago Selatan	2022
Sungai Limau	Nagari Kuranji Hilir	2015
	Nagari Pilubang	2020
	Nagari Koto Tinggi	2020
	Nagari Guguak Kuranji Hilir	2020
Batang Gasan	Nagari Malai V Suku	2020
	Nagari Gasan Gadang	2020

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa sejak tahun 2015 telah dilaksanakan pembentukan Desa Tangguh Bencana di Nagari Katapiang dan Nagari Kuranji Hilir. Namun fenomena yang ditemukan di lapangan bahwa 16 Nagari Tangguh Bencana ini masih berada pada kategori ketangguhan level pratama. Pada program Desa Tangguh Bencana ini terdapat kategori ketangguhan yang diukur berdasarkan aspek dan indikator dari program tersebut yang mana terdapat aspek: (1)Legislasi; (2)Perencanaan; (3)Kelembagaan; (4)Pendanaan; (5)Pengembangan Kapasitas; dan

(6)Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hasil dari penilaian ini akan dikelompokkan menjadi:

- a) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (Skor 51-60)
- b) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya (Skor 36-50)
- c) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama (Skor 20-35)

Indikator penilaian Desa Tangguh Bencana memiliki 60 butir pertanyaan kuesioner yang harus dapat terjawab yang akan memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

1. Legislasi yaitu penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa.
2. Perencanaan yaitu penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (Pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan).
3. Kelembagaan yaitu pembentukan Forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW/RT, serta pengembangan kerja sama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana.
4. Pendanaan yaitu rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/Kota, APB Desa/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)



5. Pengembangan kapasitas yaitu pelatihan, Pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yaitu kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Resti Fajria (2022) bahwa pelaksanaan mitigasi bencana dalam program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Padang Pariaman sudah berjalan namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal sehingga tujuan sebenarnya dari program tersebut belum tercapai sepenuhnya<sup>3</sup>. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa tujuan dari Desa Tangguh Bencana yang ingin menjadikan nagari dapat mandiri dan beradaptasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan belum terselenggara dengan baik pada tingkat nagari. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman aktor yang terlibat pada tingkat nagari, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, serta kurangnya anggaran untuk pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana pada tingkat Nagari.

---

<sup>3</sup> Resti Fajria, Mitigasi Bencana Melalui Program Desa Tangguh Bencana oleh BPBD Kabupaten Padang Pariaman, Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Andalas, Padang, 2022

Maka dari itu perlu dilakukan sebuah evaluasi terhadap program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Padang Pariaman dengan tujuan agar dilakukan untuk kepentingan dalam menentukan suatu keputusan atau kebijakan (rekomendasi) untuk program. Berkaitan dengan kajian evaluasi dalam aspek kebencanaan, berdasarkan penelitian oleh Ayerbe, dkk (2020) yang menulis tentang *An Evaluation of Availability and adequacy of Multi-Hazard Early Warning Systems in Asian Countries: A baseline study*<sup>4</sup> menjelaskan terkait evaluasi ketersediaan dan kecukupan sistem peringatan dini multi-hazard di negara-negara asia yang berfokus pada Maldives, Sri Lanka, Myanmar, dan Filipina Hasil tersebut menunjukkan hasil bahwa di Sri Lanka, tidak satu pun dari keempat elemen MHEWS dan tema-tema utama telah dinilai dan dikembangkan sepenuhnya, kecuali keberadaan sistem pemantauan. Di Filipina, hasil menunjukkan bahwa MHEWS berkembang dan beroperasi dengan baik, khususnya terkait pengetahuan risiko bencana dan deteksi, pemantauan, analisis, dan peramalan bahaya dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Di Maldives, elemen penyebarluasan dan komunikasi, serta kemampuan kesiapsiagaan dan respons berada dalam tahap pengembangan perantara. Sementara itu proses pengorganisasian dan pengambilan keputusan serta komunikasi peringatan dini tidak berkembang penuh. Kemudian di Myanmar kurangnya komunikasi antar dan intra kelembagaan. Singkatnya, elemen MHEWS yang kurang berkembang untuk DMH adalah Pengetahuan Risiko Bencana, sedangkan untuk DDR adalah Deteksi, pemantauan, analisis, dan peramalan bahaya dan

---

<sup>4</sup> Ignacio Aguirre-Ayerbe, dkk, An evaluation of availability and adequacy of Multi-Hazard Early Warning Systems in Asian countries: A baseline study. *International journal of disaster risk reduction*, 49, 2020.

konsekuensi yang mungkin terjadi. Namun, kedua lembaga tersebut memiliki kesamaan dalam penilaian elemen Kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap sebagai elemen MHEWS yang paling berkembang di Myanmar.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa peran badan koordinasi biasanya terkait dengan penyebaran pesan peringatan, koordinasi darurat atau promosi strategi kesiapsiagaan di fase hilir. Oleh karena itu, fungsi badan koordinasi dan mekanisme koordinasi antar badan harus didefinisikan dengan jelas, menghindari kesenjangan atau tumpang tindih, untuk memastikan bahwa masalah peringatan sampai ke masyarakat secara tepat waktu dan efektif. Wirawan (2011) menyatakan bahwa evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi<sup>5</sup>. Dalam hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional.

Berdasarkan hasil pemetaan riset Program Desa Tangguh Bencana, topik penelitian mengenai program Desa Tangguh Bencana masih terfokus pada efektivitas program Desa Tangguh Bencana, implementasi program Desa Tangguh Bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan kapasitas. Adapun penelitian yang terkait dengan evaluasi Program Desa Tangguh Bencana terdapat sebagai berikut, pertama oleh Poespito Hadi, dkk (2019) menyatakan bahwa perlunya pelatihan secara khusus bagi masyarakat di Desa agar program Desa

---

<sup>5</sup> Ambiyar dan Muharika, Metodologi Penelitian Evaluasi Program, Bandung, Alfabeta, 2019, hlm 19

Tangguh Bencana dapat berjalan dengan baik<sup>6</sup>. Dalam Penelitian oleh Munir (2017) menekankan pada evaluasi aktor dalam upaya pengurangan risiko bencana yang melibatkan masyarakat dalam program Desa Tangguh Bencana<sup>7</sup>. Kemudian penelitian dari Kartika (2021) menggambarkan bahwa dimensi dalam program ini masih didominasi pada aspek reflektif yaitu masih terpusat pada aspek yang bersifat formal sedangkan aspek normatif belum dilakukan secara maksimal<sup>8</sup>.

Selanjutnya penelitian Salim dkk (2022)<sup>9</sup> dan Prameisa (2018)<sup>10</sup> fokus pada bencana banjir, penelitian oleh Rini dkk (2021) fokus pada evaluasi Destana pada bencana Kebakaran Hutan dan Lahan<sup>11</sup>. Serta penelitian dari Istiqowati (2018) berfokus pada evaluasi Destana dalam mitigasi bencana<sup>12</sup>. Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan program Desa Tangguh Bencana yang akhirnya dapat menciptakan kebaruaran dalam penelitian. Bertolak dari penelitian sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada tahap evaluasi pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana pada tahap pra bencana yaitu pada situasi tidak ada bencana dan situasi terdapat potensi bencana dalam penyelenggaraan program Desa Tangguh

---

<sup>6</sup> Wibisono Poespito Hadi, dkk., Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Guna Mendukung Keamanan Nasional (Studi di Desa Tanjung Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung-Bali)

<sup>7</sup> Miftakhul Munir, Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kendal Tahun 2016, *Journal of Political and Government Studies*, 2017, Vol. 6, No. 03

<sup>8</sup> Kartika Purwaningtyas, Evaluasi Desa Tangguh Bencana dalam Perspektif Formatif dan Reflektif Ketangguhan Masyarakat, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2021, Vol. 9, No. 1.

<sup>9</sup> Kovic Salim, dkk Evaluasi Efektivitas Program Kampung Siaga Bencana (Ksb) Pegangsaan Dua: Studi Kasus Rw 03. *Jurnal Pelita Kota*, 2022, Vol. 3, No. 2, 189-206.

<sup>10</sup> Dellarizki Prameisa, Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk Penanggulangan Banjir, Skripsi Jurusan Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, 2018, Malang

<sup>11</sup> Ratih Setyo Rini, dkk, Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana Di Provinsi Riau. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 2021, Vol. 4, No. 3, 588-597.

<sup>12</sup> Cici Istiqowati, Evaluasi Program DESTANA dalam Mitigasi Bencana (Studi pada Desa Sumberanom Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, Skripsi Jurusan Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, 2018, Malang



Bencana di Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian pada tahap saat terjadinya bencana dan pasca bencana. Pada penelitian ini akan dilihat aspek risiko bencana yang terjadi dalam skala lokal pada tingkat Nagari yang menjadi lokus program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Nagari Katapiang, Nagari Seulayat Ulakan dan Nagari Tapakih. Ketiga nagari ini memiliki risiko bencana seperti banjir, gelombang ekstrem, abrasi pantai, angin puting beliung dan tsunami.

Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Padang Pariaman pertama kali dilaksanakan pada Tahun 2015 di Nagari Katapiang dan Nagari Kuranji Hilir dengan pendanaan dari APBD Provinsi Sumatera Barat dengan dana sebesar Rp. 90.000.00 (*sembilan puluh juta ribu rupiah*) dengan pelaksanaan pertemuan sebanyak 3 kali di tahun pembentukan<sup>13</sup>. Hal ini mengartikan bahwa pengembangan program ini telah dilaksanakan sejak 7 tahun terakhir. Namun, berdasarkan observasi masih kurang berperannya program Desa Tangguh Bencana sebagai upaya pengurangan risiko bencana di Nagari Katapiang, hal ini terlihat dalam proses tindak lanjut pasca pengembangan program ini di tahun 2015 masih kurang, terlihat dengan FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana) Nagari yang belum diperbarui setelah habis masa berlaku SK dan ini vakum sejak tahun 2020.

Pentingnya peran FPRB berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus ada dalam tubuh program Desa Tangguh Bencana sebab

---

<sup>13</sup> Friska, Implementasi Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahunto, Skripsi Jurusan Administrasi Publik, Universitas Andalas, 2020



memiliki fungsi sebagai wadah yang menyatukan para pihak pemangku kepentingan yang bergerak dalam upaya pengurangan risiko bencana mulai dari fase pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Hal ini juga dapat diartikan perlunya monitoring dari BPBD Padang Pariaman selaku *leading sector* dalam program ini terhadap nagari yang telah membentuk program Desa Tangguh Bencana. Sedangkan pengembangan Desa Tangguh Bencana harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, memanfaatkan sumberdaya lokal, mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas, sekaligus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terkait kebencanaan. Dan Perlunya dukungan Pemerintah/Pemerintah Daerah guna memastikan keberlanjutan Program Destana. Maka perlu dilakukan kajian evaluasi yaitu evaluasi yang dilakukan dalam bentuk akuntabilitas, dampak dan hasil tentang apa yang di capai atau tidak di capai terkait program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Padang Pariaman agar dapat mengetahui apakah tujuan tercapai dan apakah strategi implementasi berhasil dalam menggerakkan program ke arah yang diinginkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang peneliti rancang berdasarkan pada tindak lanjut program Desa Tangguh Bencana pada tingkat nagari di Nagari Katapiang, Nagari Seulayat Ulakan dan Tapakih masih stagnan pada level pratama sejak awal berkembangnya program ini. Sehingga melahirkan rumusan masalah yaitu “Bagaimana Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Padang Pariaman?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Padang Pariaman agar dapat melihat dampak dan manfaat dari program Desa Tangguh Bencana sehingga dapat memberikan rekomendasi terhadap instrumen yang direkomendasikan. Sehingga program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Padang Pariaman dapat terlaksana dengan adaptif dan mandiri pada risiko bencana pada skala nagari.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan keilmuan Administrasi Publik, karena penelitian yang akan peneliti angkat ini terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi kebijakan publik terutama tentang evaluasi kebijakan. Dengan demikian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini, manfaat yang dirasakan oleh peneliti yaitu sebagai wadah untuk menerapkan ilmu

pengetahuan selama perkuliahan terutama dalam konteks kebijakan publik.

2. Bagi lembaga, manfaat yang diharapkan yaitu sebagai bahan acuan dan wawasan serta rekomendasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terhadap instansi terkait dalam evaluasi program Desa Tangguh Bencana oleh BPBD Kabupaten Padang Pariaman
3. Bagi pihak lain, sebagai penambahan wawasan tentang evaluasi program Desa Tangguh Bencana.

